YAMAHA Revs your Heart SEMAKIN DI DEPAN

SULTENG RAYA

WAR ON DRUGS For Humanity

SELASA, 3 NOVEMBER 2026 | 8 HALAMAN

Perekat Rakyat Sulteng

LANGGANAN: RP.100.000,- | ECERAN: RP.5.000,-

Kapal Dorolonda Perkuat Perekonomian di Donggala

KAPAL penumpang KM Dorolonda bersiap sandar perdana di Pelabuhan Donggala, Sabtu (31/10/2026). **FOTO: ANTARA/ MOH SALAM**

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten Donggala menyebutkan keberadaan kapal penumpang KM Dorolonda di Pelabuhan Donggala akan memperkuat konektivitas transportasi laut serta menggerakkan roda perekonomian di daerahnya.

Bupati Donggala Vera Elena Laruni di Banawa, Donggala, Minggu, mengatakan beroperasinya KM Dorolonda di Pelabuhan Donggala merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi laut sekaligus membuka kembali akses pelayanan angkutan penumpang bagi masyarakat.

"Hadirnya KM Dorolonda ini bisa meningkatkan mobilitas masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Kabupaten Donggala," kata Vera.

Ia mengemukakan ke depan seluruh kapal penumpang lainnya seperti KM Lambelu dan KM Labobar bisa memberikan layanan di Pelabuhan Donggala.

"Tentunya, ini sejalan dengan rencana pengembangan pelabuhan yang telah tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Teluk Palu," ucapnya.

Baca **KAPAL** Hal. 7

POLRES MOROWALI

Ungkap Penyalahgunaan Solar Subsidi 1.820 Liter

SULTENG RAYA — Satuan Reskrim Polres Morowali, Polda Sulawesi Tengah, berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar.

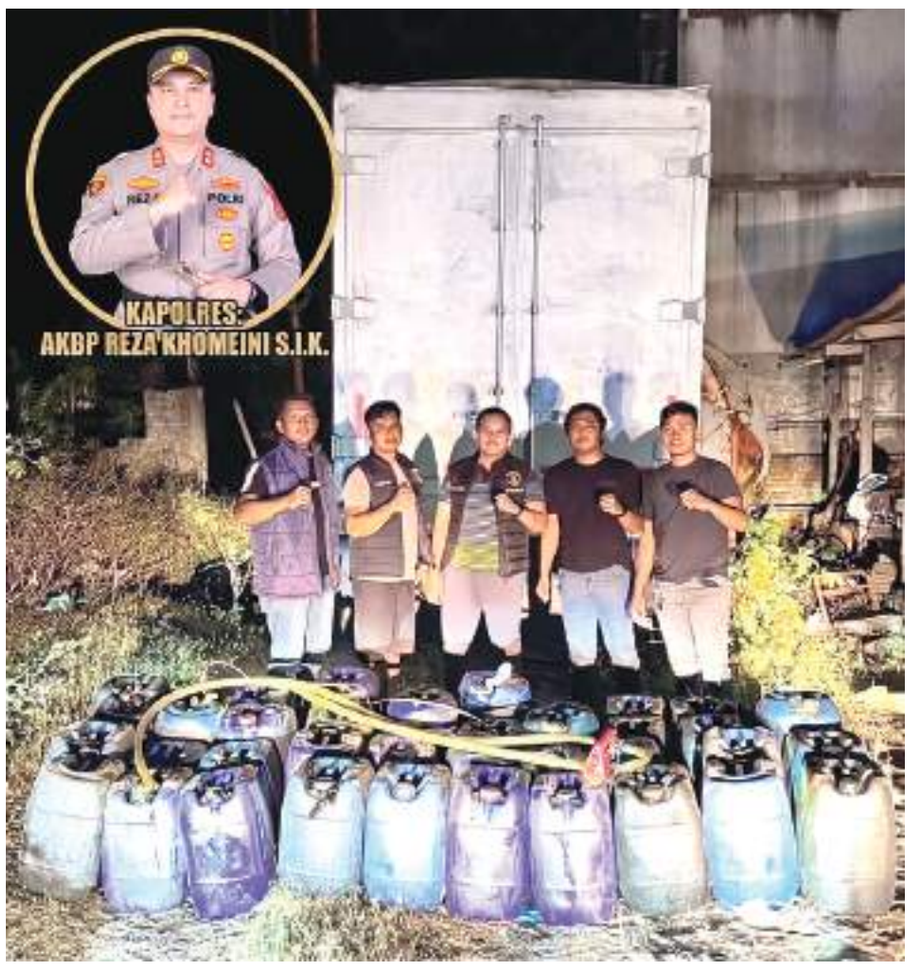

POLRES Morowali mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar. **FOTO: IST**

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti, termasuk dua unit mobil ekspedisi Hino yang tangkinya dimodifikasi.

Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini dalam konferensi pers di Mapolres Morowali, Senin (2/11/2026), menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berkat pengembangan anggota Unit Reaksi Cepat (URC) Sat Reskrim.

Kejadian bermula pada Jumat, 30 Oktober 2026, sekitar pukul 22.00 WITA, di Desa Lanona, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

"Empat orang terduga pelaku berinisial J (36), S (31), RP (29), dan RS (18) diamankan saat diduga sedang memindahkan BBM solar bersubsidi dari tangki mobil ekspedisi ke jerigen," ujar Kapolres.

Modus yang digunakan para pelaku cukup rapi. Mereka mengisi solar bersubsidi di tiga SPBU di wilayah Sulawesi Selatan dengan menggunakan barcode subsidi. BBM tersebut kemudian ditampung di tangki rakitan berkapasitas 600 hingga 650 liter—jauh di atas kapasitas normal.

Selanjutnya, solar dipindahkan ke 40 jerigen berisi 33 liter per jerigen menggunakan mesin pompa hisap elektrik dan selang sepanjang sekitar 4 meter.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita dua unit mobil Hino (B 9135 SEU dan B 9472 TEW), 40 jerigen berisi Bio Solar, 17 jerigen kosong,

Baca **UNGKAP** Hal. 7

PEMKAB PARIGI MOUTONG

Susun Strategi Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak

KEGIATAN Lokakarya I penyusunan dokumen percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak periode 2026–2030 di aula lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (2/11/2026). **FOTO: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG**

SULTENG RAYA – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai menyusun dokumen percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak periode 2026–2030.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat kebijakan dan program lintas sektor dalam menekan angka kematian ibu dan anak di daerah itu.

Penyusunan dokumen tersebut dibahas melalui Lokakarya I yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong di aula di lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (2/11/2026).

Baca **PEMKAB** Hal. 7

14 Hektar Lahan Perkebunan di Taopa Terbakar

UPAYA pemadaman api di lahan perkebunan milik warga di Kecamatan Taopa, Jumat (30/10/2026). **FOTO: IST**

SULTENG RAYA – Kebakaran lahan perkebunan seluas 14 hektare terjadi di Dusun III, Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Jumat (30/10/2026).

Peristiwa tersebut mengakibatkan tujuh warga mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp116,3 juta.

Sebagian besar lahan yang terbakar merupakan perkebunan kelapa, sedangkan lainnya berupa lahan kosong dan lokasi empang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kapolsek Moutong, AKP Felix Alfons Saudale, menjelaskan, informasi awal kebakaran diterima pemerintah desa pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 20.00 Wita.

Informasi itu disampaikan Imam Desa Tuladenggi Sibatang, Hairil, kepada Kepala Desa Thamrin Hasan terkait kebakaran di salah satu lahan perkebunan warga.

Baca **TERBAKAR** Hal. 7

Sekprov Novalina Dorong Percepatan Pengakuan MHA di Sulteng

SULTENG RAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina menegaskan pentingnya percepatan proses verifikasi dan validasi dokumen usulan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Sulteng.

Percepatan ini sebagai upaya memperkuat pengakuan dan pelindungan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Percepatan ini disampaikan Novalina saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Panitia Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (2/11/2026).

Ia menyampaikan bahwa terdapat tujuh dokumen usulan masyarakat hukum adat yang telah masuk dan perlu

Baca **SEKPROV** Hal. 7

PLN Pastikan Kesiapan Listrik di SMA Taruna Nusantara

SULTENG RAYA - Dalam rangka mendukung suksesnya agenda strategis nasional di sektor pendidikan, PT PLN (Persero) bergerak cepat memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan jelang peresmian kompleks SMA Taruna Nusantara yang berlokasi di Koyawas, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa.

Pemantauan dan pengecekan langsung jaringan ini dilakukan guna menjamin pasokan listrik yang andal, aman, dan tanpa kedip selama perhelatan berlangsung.

Kawasan pendidikan dengan luas sekitar 25 hektare ini membutuhkan perencanaan dan keandalan pasokan listrik yang prima.

LOKASI SMA Taruna Nusantara yang akan diresmikan. **FOTO : PLN**

Baca **PLN** Hal. 7

Dosen Poltekkes Palu Latih Kader Posyandu Deteksi Dini Depresi dan Hipertensi

SULTENG RAYA - Upaya penguatan garda terdepan kesehatan masyarakat terus digalakkan di Kabupaten Donggala melalui kolaborasi akademisi dan praktisi lapangan. Tim Dosen Poltekkes Kemenkes Palu menggelar pelatihan intensif bagi belasan kader Posyandu di Kelurahan Kabonga Kecil bertajuk "Peningkatan Kapasitas Kader dalam Deteksi Dini Risiko Depresi dan Hipertensi Melalui Intervensi Terpadu Kesehatan Jiwa dan Jantung.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh Aminuddin, S.Kep.Ns., M.Kes, ini dirancang untuk mensinergikan penanganan dua masalah kesehatan yang sering berkaitan erat, yakni tekanan darah tinggi (hipertensi) dan gangguan kesehatan mental (depresi)

Dalam arahannya, Aminuddin menekankan bahwa deteksi dini di tingkat akar rumput adalah kunci sebelum kondisi kesehatan warga memburuk.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan deteksi dini terhadap risiko depresi dan hipertensi yang merupakan dua masalah kesehatan yang sering terjadi di masyarakat dan saling berkaitan," jelas Aminuddin

Pelatihan ini menghadirkan dua pakar utama sebagai narasumber. Dr. Irsanty Collein memberikan pendalaman materi mengenai penanganan hipertensi, sementara Eli Saripah memaparkan teknik integrasi deteksi dini risiko depresi. Sebanyak 17 kader dari wilayah kerja Puskesmas Gonenggati dibekali pengetahuan teoritis serta keterampilan praktis dalam melakukan skrining yang akurat.

Selama kegiatan, para peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terutama saat sesi praktik skrining yang memadukan aspek fisik dan psikologis secara bersamaan. Dengan bekal keahlian baru ini, para kader diharapkan mampu menjadi "detektor dini" yang tangguh guna menekan angka kesakitan fisik dan mental di wilayah Kabupaten Donggala secara berkelanjutan. AMR

Penyimpangan Dana Hibah Masjid di Sirenja Masuk Tahap Penyidikan

GUSTI STANIA PERMANA

SULTENG RAYA — Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, kini memasuki tahap penyidikan.

Dana hibah yang menjadi objek penanganan perkara tersebut disebut bernilai sekitar Rp550 juta dan bersumber dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, perkara tersebut telah melalui proses penyelidikan. Setelah dilakukan pendalaman terhadap sejumlah informasi dan dokumen terkait penggunaan dana hibah, penanganannya kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mengungkap secara lebih terang dugaan penyimpangan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Dalam perkara ini, penyidik akan mendalami antara lain proses penerimaan dana hibah, penggunaan anggaran, pelaksanaan pembangunan Masjid Nurul Yaqin, pertanggungjawaban penggunaan dana, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.

Dugaan sementara yang menjadi perhatian aparat penegak hukum adalah adanya penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Salah satu hal yang akan didalami adalah dugaan bahwa sebagian dana digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang terlibat dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Selain itu, penyidik juga akan mendalami status dan peran pihak-pihak yang disebut memiliki rangkap jabatan sebagai pengurus atau pelaksana kegiatan sekaligus aparatur desa. Hal tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk memastikan apakah terdapat konflik kepentingan maupun pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dana hibah.

Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Gusti Stania Permana, S.H., meminta masyarakat untuk turut mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Senin 2 November 2026.

Menurut Gusti, pengawasan publik diperlukan agar proses penanganan perkara berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami meminta masyarakat ikut mengawal perkembangan perkara ini. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena persoalan ini menyangkut hajat banyak orang," ujar Gusti.

Ia menegaskan, peningkatan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan merupakan bagian dari proses hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti secara lebih mendalam. Karena itu, seluruh pihak yang nantinya disebut atau diperiksa dalam perkara tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan sesuai dengan ketentuan hukum.

Penyidik juga akan memastikan sejauh mana penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan proposal, peruntukan, serta ketentuan pemberian hibah pemerintah daerah.

Dana hibah pemerintah pada prinsipnya diperuntukkan bagi kepentingan yang telah ditetapkan dalam pemberian bantuan. Karena itu, penggunaan dana di luar peruntukan akan menjadi salah satu aspek yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

Masjid Nurul Yaqin Desa Tondo sendiri tercantum dalam daftar penerima hibah keagamaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, publik kini menunggu hasil pendalaman aparat penegak hukum mengenai penggunaan dana sekitar Rp550 juta tersebut, termasuk apakah benar terdapat kerugian keuangan negara serta siapa saja pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Proses penyidikan nantinya tetap mengedepankan Prinsip praduga tak bersalah dan tetap berlaku terhadap seluruh pihak sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. */AMR

Intip Keunikan Modifikasi Skutik MAXI Yamaha di 5 Kota Indonesia

KONTES modifikasi CustoMAXI 2026. FOTO YAMAHA

SULTENG RAYA – Setelah berlangsung selama lebih dari dua bulan, rangkaian kontes modifikasi CustoMAXI 2026 sukses menyambangi lima kota besar di Indonesia, yaitu Semarang, Bandung, Makassar, Bali, dan Pekanbaru. Kini, ajang adu kreativitas bagi pengguna skutik MAXI Yamaha tersebut segera memasuki babak Grand Final yang akan diselenggarakan di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, ICE BSD, Tangerang, pada akhir November mendatang.

Sepanjang penyelenggaraan regional, lebih dari 800 modifikator telah menuangkan ide dan kreativitas terbaik pada jajaran TMAX, XMAX, NMAX, AEROX, dan LEXI lintas generasi. Melalui Empat kelas utama, yakni Master MAXI, Super MAXI, Street MAXI dan Meet Up MAXI, para peserta menghadirkan beragam aliran modifikasi yang menjadikan skutik MAXI Yamaha semakin unik, berkarakter, dan bernilai premium.

Gelaran tahun ini turut menorehkan sejumlah catatan menarik, termasuk peningkatan jumlah peserta dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Antusiasme tersebut sejalan dengan semakin kuatnya citra CustoMAXI sebagai kontes modifikasi bergengsi yang diselenggarakan langsung oleh pabrikan. Pilihan kelas yang semakin beragam serta banyaknya penghargaan, termasuk 26 kategori di kelas Meet Up MAXI (fun awarding), juga membuka kesempatan lebih luas bagi modifikator dari berbagai tingkat pengalaman dan latar belakang untuk mendapatkan apresiasi atas karya mereka.

Tren menarik lainnya terlihat dari semakin banyaknya pengguna XMAX yang berpartisipasi dengan konsep modifikasi mewah, premium, dan sarat detail. Kehadiran sejumlah peserta yang membawa TMAX, model CBU dengan posisi tertinggi dalam jajaran skutik MAXI Yamaha, turut menambah daya tarik sekaligus memperkaya ragam karya yang tampil sepanjang kompetisi.

"Terima kasih kepada seluruh peserta CustoMAXI 2026 dan konsumen MAXI Yamaha yang telah meramaikan rangkaian acara di lima kota besar di Indonesia. Antusiasme yang luar biasa ini membuktikan bahwa skutik MAXI Yamaha telah menjadi simbol gaya hidup yang terus melahirkan tren di segmen skutik premium Tanah Air, sekaligus turut menggairahkan industri otomotif, khususnya produk-produk aftermarket. Menjelang Grand Final, kami berharap para finalis dapat mempersiapkan karya terbaik, tampil maksimal, serta berkompetisi secara sportif. Semoga karya-karya yang dihadirkan dapat menjadi inspirasi bagi pengguna MAXI Yamaha lainnya untuk mengekspresikan karakter dan passion mereka,"ungkap Rifki Maulana, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Selain persaingan yang kompetitif, setiap kota penyelenggaraan CustoMAXI 2026 memiliki cerita dan karakter modifikasi tersendiri. Mulai dari eksplorasi material, penentuan konsep yang megangkat budaya, hingga penggunaan teknologi untuk mengoperasikan berbagai komponen motor, berikut sejumlah sorotan menarik dari kelima seri regional. Semarang: XMAX Titanium Bergaya Drag Race

Sebagai kota pembuka, Semarang langsung menunjukkan antusiasme tinggi dengan jumlah peserta terbanyak di antara seluruh kota penyelenggaraan, mencapai lebih dari 100 peserta. Seri ini juga menjadi panggung bagi Udin El yang menghadirkan satu-satunya XMAX bergaya drag race di kelas Master MAXI, Bandung: Persaingan Ketat dengan Modifikasi Sarat Teknologi

Sebagai kota yang lekat dengan perkembangan tren dan budaya bermotor, Bandung menghadirkan persaingan yang sangat kompetitif, salah satu sorotan datang dari XMAX bergaya Batman garapan MWM Motorworks yang berhasil memenangkan kelas Master MAXI, sementara keunikan seri Makassar hadir melalui XMAX milik Haji Usman Vhendrank, modifikator asal Pangkep yang berhasil memenangkan kelas Super MAXI. Identitas Sulawesi Selatan juga ditampilkan melalui airbrush bergambar Sultan Hasanuddin serta simbol Ayam Jantan dari Timur pada bagian depan motor, lalu kembalinya CustoMAXI ke Bali setelah tujuh tahun disambut dengan karya-karya inovatif. Berbagai peserta mengaplikasikan sistem motorized yang memungkinkan windshield, jok, suspensi, hingga perangkat audio dioperasikan menggunakan stik PlayStation maupun ponsel.

Salah satu karya paling menarik adalah XMAX milik Putu Mona Prabawa Putra, pemenang kelas Super MAXI. Motor tersebut dilengkapi sistem autentikasi sidik jari serta pembaca RFID yang memanfaatkan E-KTP miliknya untuk mengaktifkan motor.

Kemudian,sebagai penutup rangkaian regional, Pekanbaru menghadirkan karakter berbeda melalui jumlah peserta pengguna NMAX yang menjadi terbanyak dibandingkan kota-kota lainnya. Permainan airbrush menjadi salah satu daya tarik utama, dengan pengerjaan yang rapi, komposisi warna yang kuat, serta garis desain dinamis. Beragam karya tersebut menunjukkan luasnya ruang eksplorasi NMAX sebagai medium ekspresi bagi para penggunanya. */HJ

Wakapolres Touna Edukasi Siswa Stop Bullying dan Narkoba

SULTENG RAYA — Wakapolres Tojo Una-Una (Touna), Kompol Junus Djoni Achpah, memimpin langsung pelaksanaan kegiatan 'Polisi Peduli Pendidikan' di SMPN 2 Ratolindo, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Touna, Senin (2/11/2026) pagi.

Kehadiran jajaran Polres Touna yang bertindak sebagai pembina upacara bendera itu merupakan wujud nyata implementasi Program Prioritas 100 Hari Kapolri bertajuk Polisi Bersama Masyarakat (PBM).

Dalam giat tersebut, Kompol Junus Djoni Achpah didampingi oleh Kasat Binmas AKP Agus Habibie, KBO Binmas Aiptu H. Abdullah, Kanit Binmas Aiptu Ade Saiful, serta Kanit Bintibsos Aipda Hori Lalona.

Di hadapan para pelajar dan tenaga pendidik, Wakapolres Kompol Junus Djoni Achpah menyampaikan sejumlah pesan krusial terkait pembinaan karakter generasi muda dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Kami mengajak seluruh siswa untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat," ujar Kompol Junus.

Wakapolres juga memberikan perhatian khusus pada maraknya aksi perundungan dan bahaya peredaran gelap narkoba yang rentan menyasar usia remaja.

"Stop tindakan bullying atau perundungan sesama siswa di sekolah. Selain itu, mari bersama-sama kita bentengi diri dan mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar," tegasnya. Tidak hanya menyentuh isu sosial di dunia nyata, Wakapolres Touna turut mengedukasi para siswa agar cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi informasi maupun platform media sosial.

"Kami mengimbau para siswa agar bijak dalam bermedia sosial. Saring setiap informasi sebelum membagikannya demi mencegah sebaran hoaks, serta jauhi segala bentuk informasi yang mengandung ujaran kebencian," tambahnya.

Kedatangan rombongan Polres Touna disambut hangat dan positif oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Ratolindo, Mustamin Abdul Hair, S.Ag., bersama seluruh dewan guru dan para pelajar.

Pihak sekolah mengapresiasi langkah kepolisian yang turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi Kamtibmas sejak dini. AMR

WAKAPOLRES Touna, saat memberikan edukasi siswa SMPN 2 Ratolindo cegah bullying, Senin (2/11/2026). FOTO: IST

Ops Patuh Tinombala 2026, Polisi Tindak 315 Pelanggaran Lalu Lintas

Personel Satgas Gakkum Operasi Patuh Tinombala 2026 saat melakukan penertiban dan penindakan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Foto: Dok Ditlantas Polda Sulteng

SULTENG RAYA – Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Patuh Tinombala 2026 terus mengintensifkan kegiatan penertiban dan penindakan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, Ahad (1/11/2026).

Kegiatan yang meliputi Penindakan Pelanggaran (Dakgar) dan Penertiban Pelanggaran (Daktib) tersebut bertujuan meningkatkan disiplin serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Kasatgas Gakkum Operasi Patuh Tinombala 2026, AKP Muriyanto, menjelaskan bahwa kegiatan penegakan hukum dilaksanakan melalui sejumlah metode, mulai dari penertiban pelanggaran kasatmata, penindakan menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), hingga pemberian teguran secara humanis.

Penertiban difokuskan pada pelanggaran yang berpotensi mengganggu keselamatan dan ketertiban pengguna jalan, seperti parkir tidak sesuai ketentuan, pelanggaran marka jalan, serta berbagai pelanggaran lalu lintas lainnya.

Penindakan juga dilakukan melalui ETLE, baik menggunakan kamera statis maupun kamera handheld, terhadap pelanggaran yang terdeteksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, petugas memberikan teguran secara humanis kepada pengendara yang melakukan pelanggaran, khususnya terkait kelengkapan kendaraan dan dokumen administrasi berkendara.

Sementara itu, penindakan melalui tilang manual diberlakukan terhadap pelanggaran tertentu, terutama pengendara yang melawan arus dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu, sesuai ketentuan yang berlaku.

AKP Muriyanto menegaskan, seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan proporsional, tanpa mengesampingkan ketegasan dalam penegakan aturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Minggu 01 November 2026, tercatat sebanyak 70 pelanggaran melalui ETLE statis, 65 pelanggaran melalui ETLE mobile, serta 180 pengendara diberikan teguran. Sementara itu, tidak terdapat penindakan melalui tilang manual.

Dengan demikian, total tercatat 315 pelanggaran yang ditangani melalui penindakan ETLE dan teguran.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Achmad Muhaimin, mengimbau masyarakat agar menjadikan tertib berlalu lintas sebagai kebutuhan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata karena adanya kegiatan operasi kepolisian.

Ia juga mengingatkan pengendara untuk selalu mematuhi rambu dan marka jalan, menggunakan perlengkapan keselamatan, melengkapi dokumen kendaraan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. "Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kami berharap melalui Operasi Patuh Tinombala 2026, kesadaran dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat, sehingga angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dapat ditekan," ujarnya.

"Kami berharap pelaksanaan Operasi Patuh Tinombala 2026 dapat memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menciptakan situasi Kamseltibcarlantas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif di wilayah Sulawesi Tengah," harapnya.*/YAT

Kapolda Sulteng Turun ke Jalan Ajak Pengendara Patuhi Aturan Lalu Lintas

KAPOLDA Sulteng, Irjen Pol Rizal Irawan turun langsung mengatur arus lalu lintas di Kota Palu. Tepatnya di Pos Garut, depan Ramayana, Jalan Sudirman, Senin (2/11/2026) pagi. **FOTO: DOK DITLANTAS POLDA SULTENG**

SULTENG RAYA – Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Pol Rizal Irawan kembali turun langsung mengatur arus lalu lintas di Kota Palu. Kegiatan tersebut berlangsung di Pos Garut, depan Ramayana, Jalan Sudirman, Senin (2/11/2026) sebagai bagian dari pelaksanaan Program Quick Wins Kapolri.

Dalam kegiatan itu, Kapolda Sulteng didampingi Dirlantas Polda Sulteng melalui Kasat PJR Kompol Sulardi dan Koorspripim AKBP M. Ryan Citra Yudha Siregar. Ketiganya turun langsung membantu pengaturan kendaraan di tengah aktivitas masyarakat.

Selain mengatur arus kendaraan, Kapolda juga menyapa para pengendara dan pengguna jalan. Ia mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara.

Kapolda Sulteng Irjen Rizal Irawan turut mengimbau pengendara untuk mematuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas. Keselamatan, kata dia, harus menjadi prioritas setiap pengguna jalan.

Kehadiran Kapolda Sulteng di jalan raya tersebut menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas, sekaligus mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sulteng dalam mendukung Program Quick Wins Kapolri melalui pelayanan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan langsung Kapolda Sulteng dalam pengaturan lalu lintas menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat di jalan raya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan, dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama," katanya.*/YAT

Wakapolda Sulteng Sosialisasi Larangan Vape dan Bahaya Narkoba di SMA Madani

SULTENG RAYA – Wakapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa kembali menggelar kegiatan Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di SMA Negeri Model Terpadu Madani, Senin (2/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Quick Wins Kapolri. Program Polidik akan dilaksanakan secara berkelanjutan di sejumlah sekolah.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda Sulteng Brigjen Semmy Ronny Thabaa berdialog langsung dengan para siswa. Ia memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan dampaknya bagi generasi muda.

Wakapolda Sulteng Brigjen Semmy mengatakan, Polda Sulteng saat ini serius memberantas peredaran narkoba. Pasalnya, Sulawesi Tengah disebut berada di peringkat ketiga nasional dalam peredaran narkoba.

"Artinya potensi ancaman generasi muda untuk terjerumus, terlibat, dan terikat dalam peredaran serta penyalahgunaan narkoba cukup besar," ujarnya.

Selain bahaya narkoba, Wakapolda juga menyosialisasikan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Polri.

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari penyampaian kebijakan internal kepolisian.

"Jadi, sekarang kalau ke kantor polisi untuk mengurus SIM atau keperluan lainnya, jangan mengisap vape karena nanti akan ditegur petugas," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan, kegiatan Polidik merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkoba.

"Kami berharap melalui kegiatan tersebut, para siswa dapat memahami risiko penyalahgunaan narkoba, menjauhi pergaulan yang dapat menjerumuskan, serta fokus meraih prestasi demi masa depan," jelasnya.*/YAT

HLN ke-81, YBM dan PIKK PLN UP3 Gorontalo Salurkan Bantuan Sembako

SULTENG RAYA - Bentuk kepedulian sosial dalam memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81, Yayasan Baitul Maal (YBM) bersama Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati (PIKK PLN UP3 Gorontalo kembali menunjukkan komitmen sosialnya dengan menyalurkan bantuan sembako kepada para janda dhuafa. Kegiatan sosial yang sarat akan kebersamaan ini dipusatkan di Aula Kantor PLN UP3 Gorontalo pada Kamis (29/10).

Manager PLN UP3 Gorontalo, Hanggoro Nur Purwanto, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sembako merupakan wujud nyata kepedulian insan PLN terhadap masyarakat sekitar. Kolaborasi erat antara YBM dan PIKK diharapkan tidak hanya memperluas cakupan manfaat kegiatan sosial, tetapi juga semakin mempererat hubungan harmonis antara PLN dan masyarakat.

"Melalui kolaborasi YBM dan PIKK PLN UP3 Gorontalo dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-81, kami ingin berbagi kebahagiaan dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap bantuan sembako yang disalurkan dapat memberikan manfaat dan membantu meringankan kebutuhan sehari-hari para penerima. Semoga semangat berbagi ini terus tumbuh sebagai bagian dari kepedulian insan PLN kepada masyarakat," ujar Hanggoro.

General Manager PLN UID Suluttenggo, Wahyu Prasetyo, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan sosial yang diinisiasi oleh PLN UP3 Gorontalo bersama YBM dan PIKK tersebut. Menurutnya, momentum Hari Listrik Nasional bukan sekadar perayaan pencapaian korporasi di bidang kelistrikan, melainkan juga panggilan moral untuk terus menebar kebaikan dan hadir di tengah masyarakat.

"Perayaan Hari Listrik Nasional ke-81 ini menjadi momentum yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan kembali peran PLN yang tidak hanya menghadirkan terang melalui energi listrik, tetapi juga menghadirkan kehangatan lewat kepedulian sosial. Kami sangat mengapresiasi sinergi YBM dan PIKK PLN UP3 Gorontalo yang konsisten menebar manfaat. Semoga

YAYASAN Baitul Maal (YBM) bersama Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati (PIKK) PLN UP3 Gorontalo kembali menunjukkan komitmen sosialnya dengan menyalurkan bantuan sembako kepada para janda dhuafa di Aula Kantor PLN UP3 Gorontalo pada Kamis (29/10/2026). **FOTO: PLN**

ketulusan ini membawa berkah bagi masyarakat sekaligus penyemangat bagi seluruh insan PLN dalam menjalankan misi pelayanan terbaik bagi negeri," kata Wahyu. Sementara itu, Ketua YBM PLN UP3 Gorontalo, Nazarudin Junus, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sembako dalam rangka HLN ke-81 ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama telah disalurkan pada 16 Oktober 2026 kepada 59 penerima manfaat, sedangkan tahap kedua disalurkan pada 29 Oktober 2026 kepada 150 penerima manfaat. Dengan demikian, total bantuan yang telah disalurkan mencapai 209 penerima manfaat.

Nazarudin menambahkan, seluruh dana yang digunakan bersumber dari zakat, infak, dan sedekah pegawai PLN UP3 Gorontalo yang dikelola melalui YBM.

"Alhamdulillah, dana yang dihimpun dari para pegawai dapat disalurkan secara berkelanjutan melalui berbagai program sosial, termasuk kolaborasi bersama PIKK PLN UP3 Gorontalo ini. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan berkah dan meringankan beban para penerima," ujar Nazarudin.

Kebahagiaan turut dirasakan oleh para penerima bantuan. Salah seorang warga asal Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Santi Rahman, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam atas bantuan sembako yang diterimanya.

"Saya sebagai penerima bantuan YBM PLN mengucapkan terima kasih banyak. Bantuan ini sangat berarti dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Harapan saya, semoga PLN semakin jaya, sukses, dan program mulia seperti ini dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," tutur Santi.

Melalui rangkaian kegiatan ini, YBM dan PIKK PLN UP3 Gorontalo bersama jajaran manajemen berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial. Momentum HLN ke-81 menjadi landasan yang kuat untuk memperkokoh nilai kebersamaan, kepedulian, dan dedikasi penuh dalam menghadirkan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.*/HJ

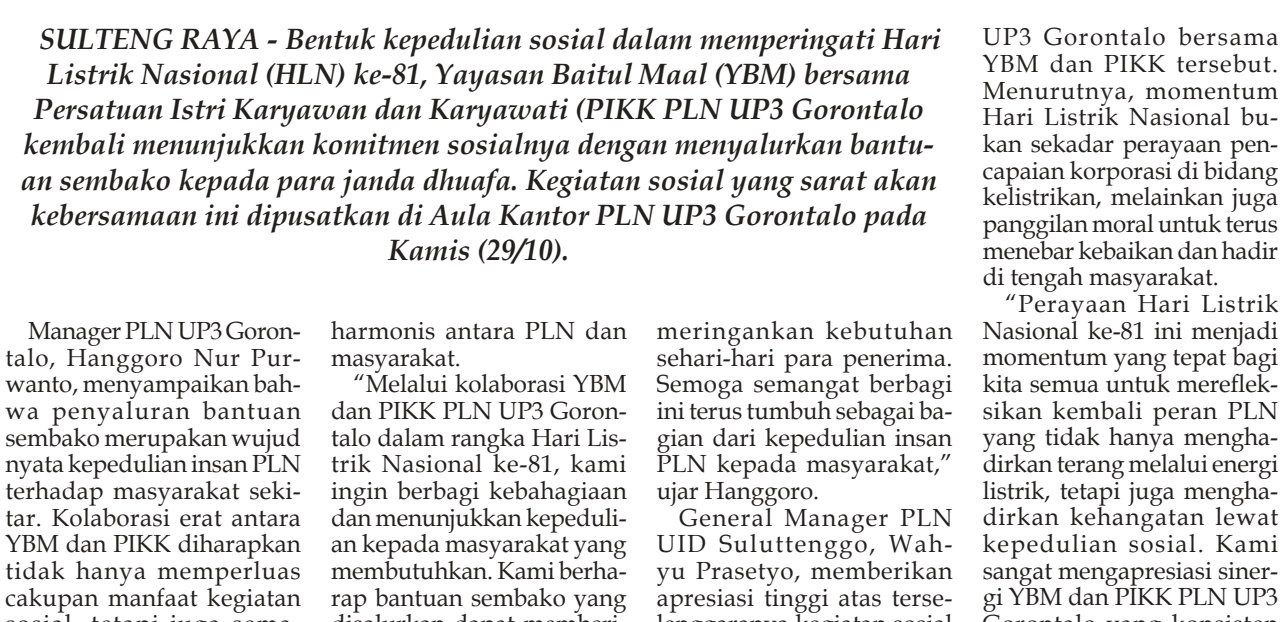

Propam Akan Periksa Dugaan Pelanggaran Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo

SULTENG RAYA - Wakapolda Jawa Tengah (Jateng) Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan mengungungkapkan, pihak Propam bakal melakukan pemeriksaan jika memang terjadi dugaan pelanggaran oleh personel yang terlibat dalam penggerebekan dan penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Penggerebekan tersebut menjadi sorotan karena dinilai sewenang-wenang dan mengintimidasi para guru serta santri yang masih berusia anak.

Andi menerangkan, penggerebekan dan penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pembakaran warung mi babi yang berlokasi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Warung tersebut dibakar orang tak dikenal pada dini hari tanggal 12 September 2026 lalu.

Menurut Andi, sebelum melakukan penggerebekan terhadap Ponpes Mahalatul Quran, pihaknya telah memperoleh surat izin daro Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kendati demikian, dia menekankan bahwa dugaan ketidaksesuaian prosedur maupun keluhan masyarakat mengenai dampak kegiatan terhadap santri tetap perlu ditangani secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berwenang.

"Kalau memang nanti ditemukan ada hal-hal yang menyangkut ketidakpuasan atau dugaan pelanggaran oleh anggota, itu menjadi ranah divisi Propam untuk menangani secara profesional. Saya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan," kata Andi saat memberikan keterangan pers di Mapolres Sukoharjo pada Sabtu (31/10/2026).

Dia mengingatkan pentingnya menghormati hak setiap orang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, pihak yang belum terbukti terlibat dalam suatu perkara tidak boleh diberikan label atau stigma yang dapat merugikan nama baiknya.

Andi mengajak seluruh elemen masyarakat tetap menjaga kondusivitas, termasuk tak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. "Rasa aman itu mahal. Jangan sampai kita terpecah belah oleh isu yang belum tentu benar. Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif," ujarnya.

Sebelumnya Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah memburu eks napi tindak pidana terorisme (napiter) berinisial I yang diduga terlibat kasus pembakaran warung mi babi di Kabupaten Sukoharjo. Dalam pelacakan keberadaan I, Polda Jateng menggerebek dan menggeledah dua pondok pesantren (ponpes) di Sukoharjo dan Karanganyar.

Pemburuan terhadap I berawal dari penangkapan ST, eks napiter yang terlibat pembakaran warung mi babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada dini hari tanggal 12 September 2026. Roy mengatakan, ST ditangkap di sebuah rumah di Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Sukoharjo, pada 19 Oktober 2026.

Dalam proses penangkapan, ST sempat melakukan penyerangan terhadap petugas menggunakan sajam dan panah. Dua petugas terluka dalam penggerebekan tersebut.

Seusai penangkapan, ST mengungkap satu terduga pelaku pembakaran warung mi babi lainnya, yakni I. Roy mengatakan, saat ini I sudah ditetapkan sebagai DPO. "Jadi si pelaku ini adalah salah satu eks napi teroris yang waktu itu melakukan tindakan terorisme di wilayah Solo kira-kira tahun 2015. (Targetnya) Polsek Pasar Kliwon," ungkap Roy saat memberikan keterangan kepada awak media di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (30/10/2026).

Roy mengungkapkan, berdasarkan hasil pengembangan, Polda Jateng mengidentifikasi dua bangunan yang diduga menjadi tempat persembunyian I. Bangunan pertama berada di Dukuh Laban Wetan, Kecamatan Mojolaban Sukoharjo.

Tim Polda Jateng dan Polres Sukoharjo kemudian melakukan penggerebekan ke bangunan tersebut pada Selasa (27/10/2026). Roy mengeklaim, penggerebekan dan penggeledahan tersebut telah mengantongi surat izin pengadilan.

"Selain kami menemukan ada anak-anak kecil di bawah umur dan anak perempuan lain yang berpakaian cadar di sana, kami temukan ada satu pedang, busur dan anak panah, hp, sangkur, dan satu kotak infak," ungkap Roy.

Roy menambahkan, berdasarkan keterangan yang diperolehnya, bangunan yang digerebek tersebut dikenal sebagai ponpes. Ponpes itu bernama Hamalatul Quran. "Namun setelah kami cek, ponpes tersebut tidak terdaftar di Kemenag," ujarnya.

Pada hari yang sama, Polda Jateng menggerebek dan menggeledah bangunan yang juga disebut sebagai ponpes di Dusun Temuireng, Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. "Di rumah yang kami geledah di Karanganyar ada peralatan-peralatan senjata tajam, busur kecil, pisau, pisau lipat, kemudian sepuluh busur panah, 12 anak panah, tempat anak panah, satu pegangan panah, kemudian satu botol spirtus, satu cairan asam kuat, kapas, drone, CCTV, HT mini, teleskop konser, satu solder, satu rol kabel listrik, dan dus warna putih," papar Roy.

Selain itu, barang bukti lain yang diamankan adalah tang, gergaji, cangkul, kunci Inggris, dan belasan kabel tis. "Kemudian ada kotak amunisi berwarna hijau bergambar bendera tauhid, satu tas senapan, dan satu plat nomor sepeda motor bernomor AD 6773 BCC," kata Roy.

Dia menambahkan, petugas juga menemukan setidaknya sepuluh buku keagamaan di TKP yang disebut sebagai ponpes di Karanganyar. "Di dua lokasi yang sudah dilakukan penggerebekan pada 27 Oktober ini ada korelasinya dengan kasus yang kami ungkap terhadap tersangka ST. Jadi satu tersangka yang sedang kami kejar yang kami DPO-kan memang tidak ada di tempat, tap kami berhasil menggeledah dua lokasi bangunan tersebut," ucapnya.

Roy menerangkan, dalam penggeledahan bangunan di Sukoharjo, terdapat 19 perempuan dan anak perempuan yang diduga merupakan santri. Polda Jateng telah memeriksa mereka dengan pendampingan dari UPTD PPA. Saat ini mereka telah dipulangkan ke orang tua dan walinya masing-masing.

Roy mengatakan, saat ini penyidikan terhadap ST dan I masih terus berlangsung. Menurut Roy, baik ST maupun I nantinya bakal dikenakan pasal dugaan pidana perusakan dan pembakaran. Selain itu, Roy menyebut, pihaknya juga bakal mengajukan pasal subsider terkait penyerangan kepada petugas saat momen penggerebekan terhadap tersangka ST.

KESAKSIAN PENGURUS PONPES

Sekretaris Ponpes Hamalatul Quran, Diyana Indah Sari, aparat kepolisian dari Polda Jateng dan Polres Sukoharjo menggerebek ponpesnya pada Selasa (27/10/2026), sekitar pukul 03.20 WIB.

"Mereka datang tanpa ada komunikasi baik-baik dulu. Jadi mereka mengetuk pintu, langsung mendobrak masuk," ucapnya ketika diwawancara Republika, Ahad (1/11/2026).

Dia mengungkapkan, personel yang melakukan pendobrakan dan merangsek masuk ke ruangan adalah Brimob. "Waktu itu posisi santri sedang tidur atau ada yang baru bangun tidur, belum mengenakan jilbab, belum mengenakan pakaian yang semestinya, tapi dari pihak Brimob memaksa masuk tanpa memberikan kesempatan pada santriwati maupun ustazah untuk persiapan terlebih dahulu," katanya.

Diyana menerangkan, Ponpes Hamalatul Quran hanya memiliki santri perempuan berjumlah 12 orang. Mereka terdiri anak berusia belasan tahun. Dua di antaranya bahkan masih balita, yakni berumur tiga dan lima tahun. Terdapat empat ustazah yang mengajar di ponpes tersebut.

Menurut Diyana, para santriwati dibekap kekalutan dan ketakutan saat Brimob melakukan penggerebekan. "Setelah berhasil masuk, mereka (personel Brimob) kemudian melakukan intimidasi dengan menodongkan senjata kepada santriwati dan ustazah. Kemudian mereka mulai melakukan penggeledahan dan menyita beberapa barang milik santri dan ustazah maupun inventaris pondok," ungkapnya.

"Pada waktu itu santri merasa ketakutan, panik. Apalagi mereka belum mengenakan jilbab, belum mengenakan pakaian yang semestinya, yang mana pada dasarnya di sini itu semua isinya perempuan anak di bawah umur, bahkan juga ada balita usia 3 dan 5 tahun," tambah Diyana.

Dia menambahkan, setelah itu, para santriwati dan ustazah ditarik keluar ruangan. Mereka berusaha menutup auratnya semaksimal mungkin. Namun ada yang belum mengenakan kaos kaki. Selain itu, ada pula yang membalut auratnya dengan sarung dan jaket. Diyana berpendapat, hal itu tidak layak.

Saat dikumpulkan di luar gedung ponpes, terdapat aparat yang langsung menginterogasi beberapa santriwati. "Ada santriwati yang sampai ditanya berkali-kali, 'Ini kamu laki-laki atau perempuan?'. Pertanyaan itu ditanyakan berkali-kali dengan bentakan yang pastinya membuat anak-anak takut," ucap Diyana.

Menurut Diyana, sebelum penggerebekan, aparat kepolisian tidak menunjukkan surat izin apapun padanya maupun pengurus lainnya. "Mereka tidak pernah menunjukkan satu lembar surat pun kepada kami hingga saat ini," kata dia.

Dia menerangkan, setelah penggerebekan dan penggeledahan, para ustazah dan santriwati dibawa ke Polsek Mojolaban. Seingat Diyana, mereka mulai diperiksa sekitar pukul 05.00 WIB. Hanya santriwati balita yang tidak diperiksa polisi.

Pemeriksaan terhadap mereka kemudian dipindah atau dilanjut di Mapolres Sukoharjo sekitar pukul 10.00 WIB. Diyana mengungkapkan, baru pada saat di Polres Sukoharjo para santriwati dan ustazah memperoleh pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Sukoharjo.

Diyana mengatakan, dia baru mengetahui bahwa penggerebekan dan penggeledahan ponpesnya berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran warung mi babi yang berlokasi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Warung tersebut dibakar orang tak dikenal pada dini hari tanggal 12 September 2026 lalu.

Menurut Diyana, pemeriksaan di Polres Sukoharjo berlangsung hingga sekitar pukul 19.00 WIB. "Untuk fokus pertanyaan selama pemeriksaan, yang pertama adalah identitas, baik santri maupun ustazah, latar belakang pendidikan, aktivitas selama di pondok, pelajaran apa saja yang dipelajari di pondok, jadwal kegiatan di pondok, kemudian ekstrakurikuler yang diikuti di pondok," ucapnya.

Dia mengungkapkan, dalam penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran, polisi menyita sejumlah barang, antara lain busur dan anak panah, drone, gawai, mesin prosesor komputer, brankas berisi uang tabungan para ustazah dan santri. Diyana mengatakan, sebagian barang-barang tersebut merupakan alat penunjang untuk kegiatan ekstrakurikuler di ponpesnya.

"Setelah 15 jam diperiksa dan barang-barang sitaan itu dibawa, dan ketika diperiksa tidak ada satupun santriwati atau ustazah yang terbukti ada keterlibatan dengan kasus (pembakaran warung mi babi) tersebut," ucap Diyana.

Oleh sebab itu, seusai pemeriksaan, para santriwati langsung dikembalikan ke orang tua atau walinya masing-masing. Selain itu, polisi juga mengembalikan barang-barang yang disita dari Ponpes Hamalatul Quran.

Menurut Diyana, penggerebekan dan penggeledahan telah menorehkan trauma, tidak hanya pada para santriwati, tapi juga ustazah. "Peristiwa tersebut, terlebih dengan pendobrakan pintu dan penodongan senjata terhadap santriwati di bawah umur, telah menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam bagi para santri dan ustazah," ujarnya. RPB

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL Palu — mandiri

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :

Madia Taher, berupa :
Sebidang tanah kosong seluas 7.063 m2 sesuai SHM No. 82/Tiwaa tanggal 16/08/1999 an. Madia Taher yang terletak di Jalan Lingkungan, Desa Tiwaa, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
Harga Limit Lelang Rp. 149.000.000,- **Setoran Uang Jaminan Rp. 32.000.000,-**

Deskripsi Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan.
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui *Playstore* pada smartphone dengan nama lelang Indonesia
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Hari /Tanggal	:	Selasa, 17 November 2026
Batas Akhir Penawaran	:	17 November 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) / 10:00 WITA
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	KPKNL Palu, Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Penetapan Pemenang	:	Setelah Batas Akhir Penawaran
Informasi Lebih Lanjut	:	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Sugiat 08118963573, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 08114504517

Makassar, 03 November 2026
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku

Dimas Wiratama
Assistant Vice President

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL Palu — mandiri

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :

Maryam Sudirman, berupa :
a. Sebidang tanah seluas 315 m2 sesuai SHM No. 1332/Gebangrejo tanggal 02/11/1996 an. Djuhana Bagenda, berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pulau Biak (Masuk Lorong), Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah.
Harga Limit Lelang Rp. 277.000.000,- **Setoran Uang Jaminan Rp. 59.000.000,-**

b. Sebidang tanah seluas 2.373 m2 sesuai SHM No. 00601/Moengko Baru tanggal 08/09/2008 an. Multazam yang terletak di Jalan Lingkar Pulau Batam (Tembus Terminal), Kel. Moengko Baru (dh. Moengko), Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah.
Harga Limit Lelang Rp. 522.000.000,- **Setoran Uang Jaminan Rp. 110.000.000,-**

c. Sebidang tanah seluas 263 m2 sesuai SHM No. 834/Kayamanya tanggal 17/11/2007 an. Multazam, berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pulau Sabang No. 81, Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah.
Harga Limit Lelang Rp. 687.000.000,- **Setoran Uang Jaminan Rp. 145.000.000,-**

Deskripsi Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan.
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui *Playstore* pada smartphone dengan nama lelang Indonesia
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Hari /Tanggal	:	Selasa, 17 November 2026
Batas Akhir Penawaran	:	17 November 2026 pukul 09:10 WIB (sesuai waktu server) / 10:10 WITA
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	KPKNL Palu, Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Penetapan Pemenang	:	Setelah Batas Akhir Penawaran
Informasi Lebih Lanjut	:	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Sugiat 08118963573, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 08114504517

Makassar, 03 November 2026
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku

Dimas Wiratama
Assistant Vice President

Pengawasan MBG dari Daerah
Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

PENGAWASAN dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten.

OLEH : GAVIN ASADIT

PENGAWASAN yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi.

BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah.

Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan.

Pengawasan tersebut menjadi penting karena keamanan makanan ditentukan sejak bahan baku diterima hingga makanan dikonsumsi anak. Kondisi penyimpanan, kebersihan peralatan, kualitas air, suhu pengolahan, waktu tunggu, dan proses pengiriman dapat memengaruhi kelayakan pangan. Oleh karena itu, inspeksi perlu mencakup seluruh rantai produksi, bukan hanya memeriksa tampilan makanan ketika sudah tiba di sekolah.

BGN juga memperkuat penilaian melalui 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Hasil pemeriksaan dikelompokkan ke dalam empat kategori, mulai dari dapur yang layak beroperasi, dapur yang membutuhkan perbaikan ringan, dapur yang harus menghentikan operasional sementara untuk perbaikan besar, hingga fasilitas yang dinyatakan tidak layak dan harus ditutup permanen. Pendekatan bertingkat ini memungkinkan tindakan korektif disesuaikan dengan tingkat risiko dan kekurangan yang ditemukan.

Di lingkungan sekolah, pengawasan menjadi lapisan perlindungan berikutnya sebelum makanan dikonsumsi siswa. BGN mendorong adanya petugas penanggung jawab yang memeriksa kondisi makanan saat diterima, termasuk melihat penampilan, mencium aroma, dan menilai kelayakannya sesuai prosedur. Apabila ditemukan indikasi makanan tidak aman, makanan tersebut harus ditahan dan tidak diberikan kepada peserta didik sampai persoalannya ditangani. Sekolah juga perlu memiliki saluran komunikasi yang jelas untuk melaporkan keterlambatan, perubahan kualitas, atau keluhan setelah makanan dikonsumsi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemerintah mulai mengintegrasikan data kesehatan untuk mengevaluasi dampak MBG terhadap status gizi anak. Data pemantauan pertumbuhan dan penimbangan balita dipadukan dengan penandaan penerima MBG agar perkembangan kondisi kesehatan dapat dianalisis secara lebih terukur. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah juga dapat membantu pemerintah memantau kondisi peserta didik dari waktu ke waktu.

Pemanfaatan data tersebut penting agar evaluasi program tidak berhenti pada jumlah porsi yang dibagikan atau banyaknya sekolah yang terlayani. Pemerintah perlu menilai apakah program berkaitan dengan perbaikan status gizi, sekaligus memastikan potensi risiko kesehatan dapat terdeteksi dan ditangani dengan cepat. Hasil pemantauan perlu menjadi dasar untuk memperbaiki komposisi menu, tata kelola dapur, serta mekanisme distribusi sesuai kebutuhan penerima manfaat.

Kunci keberhasilan pengawasan program ini terletak pada transparansi dan kolaborasi bersama masyarakat. Saat sekolah, orang tua, dan pemerintah saling terhubung, setiap laporan dapat direspons dengan cepat dan tepat. Sinergi lintas Lembaga, mulai dari fasilitas kesehatan daerah hingga BGN, menjadi jaminan utama bahwa kesehatan serta keselamatan anak-anak selalu menjadi prioritas tertinggi.

MBG hadir bukan hanya untuk menjangkau banyak anak, tetapi untuk memastikan setiap porsi yang disajikan aman, berkualitas, dan berdampak positif. Dengan pengawasan daerah yang aktif dan evaluasi yang terukur, MBG dapat terus berjalan dengan tata kelola yang kuat demi senyum dan masa depan anak-anak Indonesia. *)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan*

Gibran dan Ujian Kepastian Hukum

DUA putusan dari lembaga peradilan tertinggi ini telah membuka ruang perdebatan yang lebih luas. Persoalannya bukan lagi semata-mata tentang dokumen pendidikan seseorang, melainkan menyangkut kepastian hukum, legitimasi jabatan publik, dan bagaimana konstitusi memberikan jalan keluar ketika persyaratan seorang pejabat negara dipersoalkan setelah yang bersangkutan dilantik.

OLEH : Dr. FERY, S.Sos., M.Si

PERTANYAAN yang kemudian muncul di tengah masyarakat cukup sederhana, tetapi memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang besar, bagaimana masa depan jabatan Wakil Presiden apabila dokumen yang menjadi dasar pemenuhan salah satu persyaratan pencalonannya dinyatakan tidak sah?

Dua putusan, satu persoalan konstitusional. Pada 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangan penting yang menjadi perhatian publik adalah MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Memang, MK tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Mahkamah juga menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu karena Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Namun, persoalan tidak berhenti di sana.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Di sinilah persoalan hukum menjadi semakin menarik. MK sebelumnya menyampaikan bahwa bukti yang meyakinkan mengenai dokumen pendidikan setingkat SMA tidak ditemukan dalam perkara tersebut. Sementara itu, MA kemudian membatalkan surat keterangan yang menjadi bagian dari dasar administrasi penyetaraan pendidikan.

Kedua putusan itu memang lahir dari perkara dan kewenangan yang berbeda. MK memeriksa sengketa hasil pemilu, sedangkan MA memeriksa perkara tata usaha negara mengenai keabsahan dokumen administrasi. Karena itu, akibat hukum masing-masing putusan harus dibaca sesuai kewenangan dan amar putusannya.

Akan tetapi, keduanya menghadirkan persoalan yang tidak bisa dihindari, bagaimana memastikan bahwa pejabat yang menduduki jabatan publik telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang?

MPR bukan sekadar penonton. Dalam konteks ini, perhatian publik mulai tertuju kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mengapa MPR? Karena lembaga ini memiliki kewenangan konstitusional untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bahwa persoalan pemenuhan syarat jabatan bukan perkara yang boleh diabaikan. Jabatan publik harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kekuatan politik atau legitimasi kemenangan dalam pemilihan umum.

Namun, penting dipahami bahwa MPR tidak dapat serta-merta memberhentikan Wakil Presiden hanya karena muncul putusan MA atau perdebatan publik. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui.

Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa proses pemberhentian harus diawali dengan pendapat DPR. DPR terlebih dahulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus apakah pendapat tersebut terbukti secara hukum.

Apabila MK menyatakan bahwa Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui sidang paripurna.

Pada tahap akhir, MPR mengambil keputusan melalui mekanisme persidangan dengan persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana ditentukan konstitusi.

Artinya, masa depan jabatan Wakil Presiden memang dapat berujung pada keputusan MPR, tetapi jalannya tidak bisa melompati proses DPR dan MK.

Jangan sampai hukum kalah oleh kepentingan politik. Nah, di sinilah ujian sesungguhnya bagi demokrasi Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan persoalan konstitusional berubah menjadi sekadar pertarungan kepentingan politik. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menjadikan stabilitas politik sebagai alasan untuk mengabaikan persoalan hukum.

Ada dua prinsip yang harus berjalan beriringan. Pertama, kepastian hukum. Setiap warga negara, termasuk pejabat tertinggi negara, wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang telah menduduki jabatan strategis atau memiliki dukungan politik yang besar.

Kedua, perlindungan terhadap proses konstitusional. Pemberhentian seorang Wakil Presiden tidak boleh dilakukan berdasarkan tekanan opini publik, demonstrasi, atau tafsir sepihak atas suatu putusan pengadilan. Semua harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah.

Kita harus membedakan antara persoalan keabsahan dokumen, pemenuhan persyaratan pencalonan, dan pemberhentian dari jabatan. Ketiganya saling berkaitan, tetapi bukan persoalan yang otomatis menghasilkan akibat hukum yang sama.

Karena itu, DPR memiliki tanggung jawab untuk mencermati persoalan ini secara objektif dan konstitusional. Jika terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup, fungsi pengawasan DPR harus dijalankan.

Sebaliknya, apabila tidak memenuhi unsur konstitusional, proses pemberhentian tidak boleh dipaksakan.

MPR juga harus menempatkan dirinya sebagai lembaga negara yang menjaga konstitusi, bukan sebagai arena kompromi kepentingan politik antarkekuatan.

Rakyat menunggu kejelasan. Persoalan ini sesungguhnya memberikan pelajaran penting bagi penyelenggaraan negara. Proses pencalonan pejabat publik harus dilakukan secara transparan, teliti, dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU dan lembaga terkait tidak boleh menganggap persyaratan administrasi sebagai formalitas belaka. Sebab, ketika persoalan administrasi pencalonan baru diperdebatkan setelah seseorang dilantik, konsekuensinya dapat meluas menjadi persoalan legitimasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. *(*) Penulis: Dosen Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Palu / Wartawan Utama PWI*

TAJUK

Jangan Tunggu Musim Kemarau

SUDAH hampir separuh tahun masyarakat di berbagai pelosok negeri bergantian menahan napas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bencana itu diperparah kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino yang menerpa Indonesia.Cari Peta Wilayah

Pemerintah telah mengerahkan beragam kekuatan, mulai puluhan ribu personel gabungan, tenaga kesehatan, teknologi pemadaman, rekayasa cuaca, hingga penegakan hukum. Langkah luar biasa memang diperlukan karena karhutla bukan kelaziman yang boleh diterima sebagai siklus tahunan.

Penanganannya pun tidak boleh hangat-hangat tahi ayam. Bergegas ketika api membesar, kemudian lunglai begitu kebakaran mereda. Apalagi, karhutla telah merenggut nyawa manusia.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memprediksi fenomena El Nino berlangsung hingga Februari 2027, dengan puncaknya diperkirakan pada Desember 2026. Artinya, ancaman belum berlalu. Berkurangnya titik api bukan alasan untuk berleha-leha.

Negara mesti mengubah paradigma penanganan karhutla, dari sekadar respons darurat menjadi pencegahan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove, sistem peringatan dini, serta pelibatan Masyarakat Peduli Api menjadi keniscayaan.

Terlebih, gambut Indonesia bukan tanah biasa. Ekosistem yang terbentuk selama ribuan tahun itu merupakan penyangga tata air sekaligus penyimpan karbon.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara mencatat luas gambut tropis Indonesia sekitar 13,4 juta hektare. Hampir separuhnya terdegradasi akibat pembangunan kanal, penebangan hutan, konversi lahan, dan kebakaran.Cari Peta Wilayah

Ketika basah, gambut menyimpan air dan melepaskannya saat kemarau. Sebaliknya, ketika mengering, gambut menjadi bom waktu. Ia melepaskan emisi karbon dan rentan terbakar, bahkan jauh di bawah permukaan sehingga sulit dipadamkan.

Karena itu, pembasahan kembali, revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat gambut tidak boleh berhenti sebagai jargon.

Pemerintah harus segera memetakan wilayah rawan, memperkuat patroli terpadu, menyiapkan embung, sumber air, dan peralatan pemadam, serta memantau titik panas. Pengawasan tinggi muka air gambut wajib dilakukan konsisten sepanjang tahun.

Tanggung jawab korporasi juga mutlak ditegakkan. Pemegang konsesi wajib menjaga wilayah operasional, menyediakan sarana pemadaman, dan memastikan kegiatan usahanya tidak merusak fungsi hidrologis gambut. Siapa pun yang membakar atau membiarkan kerusakan terjadi harus ditindak. Tidak boleh ada impunitas.

Masyarakat sekitar hutan mesti menjadi mitra utama. Edukasi pembukaan lahan tanpa membakar, perhutanan sosial, pengembangan usaha ramah lingkungan, dan alternatif mata pencaharian harus diperkuat.

Pencegahan juga membutuhkan anggaran yang berkesinambungan, bukan sekadar dana darurat ketika bencana datang. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus terjaga, termasuk memastikan kesiapan petugas serta keselamatan relawan di lapangan.

Jangan sampai perhatian baru membuncah setelah langit menghitam, sekolah diliburkan, penerbangan terganggu, dan masyarakat terserang penyakit pernapasan. Harga yang dibayar terlalu mahal untuk kelalaian yang terus berulang.

Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla bukan diukur dari luas lahan yang dapat dipadamkan, melainkan dari kemampuan negara mencegah api kembali berkobar. Jangan tunggu musim kemarau untuk bersiap.**Media Indonesia*

TRIMEDIA GROUP
PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri
No. Rek. Bank Sulteng, An. **PT. Trimedia Sulteng Mandiri**
Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 7282773443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI
PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadhan)
PERCETAKAN: **TRIMEDIA GROUP**
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN **HARIAN SULTENG RAYA**, DIBEKALI KARTU **PERS**/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM **BOX REDAKSI**

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. **DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA :** Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:** Irwan.

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. **STAF REDAKSI:** Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. **SEKRETARIS REDAKSI:** Jane Lestari Parabak
LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. **BIRO DONGGALA:** Wahid Agus. **BIRO SIGI:** Feri Fadli. **BIRO PARMOUT:** Aslan Laeho. **BIRO TOUNA:** Budi.
BIRO POSO: Syamsuyadi. **BIRO BALUT:** - **BIRO MOROWALI:** Intan. **BIRO MOROWALI UTARA:** Ivan Tagora. **BIRO TOLITOLI:** Rustam.
BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro). **BIRO BANGGAI:** Pariaman T.
DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. **PEMASARAN/SIRKULASI:** Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. **KEUANGAN:** Febrianti.
EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com **TARIF IKLAN:** Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk.
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 **TLP:** 0451 4012 445 **ALAMAT PERCETAKAN:** Jl. Rusa No.36 Palu.

Vale Indonesia Dorong Kelembagaan Petani Organik Kolaka Mandiri dan Berkelanjutan

FOTO bersama pada Lokakarya Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) pada 26–27 Oktober 2026 di Lahan Sawah Blok C Selatan, Desa Puuroda, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA – Keberlanjutan pertanian organik tidak hanya ditentukan oleh praktik budidaya yang ramah lingkungan, tetapi juga oleh kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara mandiri dan membangun kelembagaan yang mampu menjaga keberlanjutan program.

Untuk mendorong hal tersebut, PT Vale Indonesia Tbk (Vale Indonesia) memfasilitasi lokakarya Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) pada 26–27 Oktober 2026 di Lahan Sawah Blok C Selatan, Desa Puuroda, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini mempertemukan petani binaan dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pengalaman penerapan PSRLB, merumuskan rekomendasi, serta menyepakati arah tindak lanjut bagi pengembangan kelembagaan petani organik yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Lokakarya berlangsung dalam dua rangkaian. Pertemuan pertama pada 26 Oktober melibatkan 50 peserta dari kalangan petani binaan untuk mengidentifikasi pembelajaran dan tantangan dalam penerapan PSRLB.

Hasil diskusi kemudian dibawa ke pertemuan kedua pada 27 Oktober yang diikuti 120 peserta dari unsur pemerintah, asosiasi petani, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan evaluasi bersama dan perumusan langkah lanjutan.

Head of External Relations Regional and Growth Vale Indonesia, Endra Kusuma, menyampaikan pengalaman petani merupakan modal penting dalam membangun model pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Karena itu, proses pemberdayaan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga pada tumbuhnya kemandirian petani dan kapasitas organisasi mereka.

"Keberlanjutan program pertanian perlu bertumpu pada kemampuan petani untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan praktik yang sesuai dengan kondisi mereka. Melalui lokakarya ini, pengalaman petani menjadi bahan pembelajaran bersama untuk merumuskan rekomendasi dan langkah tindak lanjut, sehingga praktik PSRLB dapat terus berkembang serta didukung oleh kelembagaan petani yang semakin mandiri," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Ahad (1/11/2026).

Lokakarya ini melibatkan Asosiasi Petani Organik Kolaka (ASPOK), warga belajar dari empat kecamatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Baula dan Tanggetada. Pelibatan berbagai pihak diharapkan memperluas pemahaman terhadap metode PSRLB yang dikembangkan petani sekaligus mendorong dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan penerapannya.

Dari pertemuan bersama petani, lahir empat rekomendasi utama. Pertama, pembangunan pertanian perlu mengacu pada prinsip PSRLB dengan menerapkan nilai-nilai ekologis dalam praktik usaha tani sehari-hari. Kedua, pendidikan petani perlu menitikberatkan pada pemahaman dan penyadaran berbasis pengalaman, sehingga tumbuh keyakinan untuk mengembangkan usaha tani secara mandiri.

Ketiga, pemulihan keseimbangan ekosistem perlu menjadi prioritas, terutama dalam memperbaiki kesehatan tanah yang terdampak praktik pertanian konvensional dan penggunaan pupuk kimia serta pestisida secara terus-menerus. Berdasarkan pengalaman petani, penurunan kesehatan tanah dinilai turut berkontribusi terhadap kehilangan hasil panen. Keempat, diperlukan program tindak lanjut yang jelas untuk melanjutkan tahapan pemberdayaan dan mengembangkan kelembagaan petani dengan mengedepankan prinsip kemandirian, produktivitas, kearifan, kesehatan, efisiensi, kelestarian, dan keberlanjutan.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemangku kepentingan pada 27 Oktober untuk menjadi bahan evaluasi dan penyusunan langkah berikutnya. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjembatani pembelajaran di tingkat petani dengan dukungan kelembagaan dan kebijakan, agar praktik pertanian berkelanjutan dapat berkembang secara konsisten.

EMPAT TAHUN PERJALANAN PERTANIAN ORGANIK DI KOLAKA

Camat Baula, Syahrial Darmawan, mengapresiasi kontribusi Vale Indonesia dalam mendorong pengembangan padi organik yang dimulai pada awal 2022 di Desa Hubonga dan Desa Puuroda, Kecamatan Baula. Menurutnya, perkembangan selama empat tahun terakhir menunjukkan potensi pertanian organik dalam meningkatkan pendapatan petani sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.

"Alhamdulillah, setelah empat tahun kita bisa melihat bagaimana potensi beras organik semakin berkembang dan turut meningkatkan pendapatan petani. Pasarnya sangat baik, tetapi permintaan masih cukup besar sementara ketersediaan stok terbatas. Harapan kami, pengembangan ini terus ditingkatkan melalui kerja sama antara Vale Indonesia dan petani, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan pasar," ujar Syahrial.

Ia menambahkan bahwa pemerintah kecamatan turut memfasilitasi komunikasi antara petani dan Vale Indonesia untuk menindaklanjuti kebutuhan pengembangan pertanian organik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk melalui pelatihan Training of Trainers (ToT), juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan kemampuan petani dalam menerapkan PSRLB.

Dampak perubahan praktik pertanian turut dirasakan oleh Indah, salah satu petani yang mengembangkan pertanian organik. Ia mengaku sempat menghadapi masa transisi yang menantang ketika mulai meninggalkan penggunaan pupuk kimia. Namun, dengan ketekunan dan dukungan pelanggan, ia mampu melewati masa adaptasi tersebut hingga mengembangkan beberapa sumber pendapatan dari kegiatan pertanian.

"Dulu saya sempat penasaran, apakah hanya dengan bahan-bahan alami dan rerumputan tanaman bisa tumbuh sehat. Sekarang saya bisa membuat pupuk organik dari bahan yang sebelumnya terbuang menjadi bermanfaat. Saya juga bisa menjual kompos dan tanaman dari pekarangan rumah. Sesuatu yang awalnya tidak menghasilkan, sekarang bisa menjadi sumber pendapatan," tutur Indah.

Pengalaman Indah menunjukkan bahwa peralihan menuju pertanian organik membutuhkan proses, ketekunan, serta dukungan yang memadai. Selain pengetahuan budidaya, akses pemasaran dan kepercayaan pelanggan turut membantu petani bertahan selama masa adaptasi.

Melalui lokakarya PSRLB, Vale Indonesia mendorong agar pengalaman petani menjadi dasar dalam menyusun program pemberdayaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Sinergi antara petani, pemerintah, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mendorong kelembagaan petani organik yang lebih mandiri, memperluas penerapan pertanian ramah lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. */RHT

BRI Perkuat Ekosistem Pangan dari Hulu hingga Hilir untuk Dukung Swasembada Protein

SUASANA kegiatan CNN Indonesia Agrifood Forum 2026 bertema "Swasembada Protein di Tengah Tantangan Pangan Global" yang digelar di Jakarta, Senin (19/10/2026). FOTO: DOK. BRI

SULTENG RAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pembiayaan yang menjangkau ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

Komitmen tersebut sejalan dengan penguatan agenda swasembada protein nasional yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk melalui pengembangan sektor perikanan, peternakan, UMKM, koperasi, hingga industri pengolahan.

Hal tersebut mengemuka dalam acara CNN Indonesia Agrifood Forum 2026 bertema "Swasembada Protein di Tengah Tantangan Pangan Global" yang digelar di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Forum tersebut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto, Wakil Menteri Pertanian RI Saleh Mustafa, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, serta sejumlah pimpinan BUMN.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menekankan bahwa swasembada pangan bukan semata-mata mengenai pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan nasional. Menurutnya, penguatan sektor pangan harus dibarengi dengan keberpihakan terhadap pelaku usaha di tingkat paling bawah, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan.

"Nelayan, dia paling menderita, dia paling miskin, kami harus pikirkan dia dulu," ujar Zulkifli Hasan dalam forum tersebut. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur seperti cold storage serta akses pembiayaan agar produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha pangan dapat meningkat.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menilai sektor perikanan memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Ia menekankan bahwa ikan dan hasil laut dapat dikembangkan menjadi berbagai produk pangan bernilai tambah yang lebih mudah diakses masyarakat.

"Kalau dari ikan tidak usah ditanya, hampir seluruhnya," ujar Trenggono saat membahas besarnya potensi pangan berbasis hasil laut. Menurutnya, inovasi pengolahan produk perikanan menjadi salah satu langkah penting agar sumber protein tersebut dapat dikonsumsi secara lebih luas dan terjangkau.

Dalam konteks tersebut, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan BRI memiliki posisi strategis untuk mendukung pengembangan ekosistem pangan melalui pembiayaan yang tidak hanya menyasar pelaku usaha yang telah berkembang, tetapi juga masyarakat yang baru memulai usaha.

"Kalau kita bicara pembiayaan, BRI itu mulai dari orang yang baru punya niat untuk memulai usaha sampai dengan yang sudah besar. Jadi dari sisi ultramikro ada PNM, kemudian Pegadaian, lalu masuk ke segmen mikro, kecil, sampai korporasi. Ini yang membuat kami bisa melihat ekosistem secara lebih menyeluruh," ujar Akhmad.

Menurut Akhmad, pendekatan ekosistem menjadi penting karena kebutuhan pembiayaan sektor pangan tidak berhenti pada tahap produksi. Pembiayaan dibutuhkan mulai dari sisi hulu, seperti penyediaan benih, pakan, dan peningkatan kapasitas produksi; tahap pengolahan untuk investasi, pengemasan, dan modal kerja; hingga sisi hilir yang mencakup distributor, pedagang, dan kebutuhan persediaan.

Salah satu implementasinya terlihat dalam ekosistem peternakan sapi perah di Malang. BRI dapat membiayai peternak sebagai produsen, mendukung koperasi yang memiliki fasilitas cold storage, sekaligus membiayai industri atau offtaker yang menyerap hasil produksi. Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan rantai nilai yang menciptakan kesinambungan usaha.

Dari sisi pembiayaan, hingga akhir Triwulan II 2026 total portofolio kredit BRI telah mencapai Rp1.645 triliun, dengan sekitar 75,1% disalurkan kepada segmen UMKM. Khusus KUR, sepanjang Triwulan II 2026, sekitar 44% penyalurannya mengarah ke sektor pertanian dan perikanan, yang memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem pangan dan protein nasional.

Akhmad menegaskan bahwa porsi pembiayaan kepada UMKM tetap menjadi prioritas BRI. "Tidak boleh di bawah 75%, itu harus kepada UMKM," tegasnya.

BRI juga memiliki sekitar 30 ribu tenaga pemasar di lapangan yang memiliki spesialisasi pada berbagai sektor, termasuk peternakan, perikanan, pertanian, dan perdagangan. Kapabilitas tersebut memungkinkan BRI memahami karakteristik usaha sekaligus kebutuhan pembiayaan secara lebih dekat.

"Dari awal kita sudah bisa masuk. Kita bisa membiayai dari hulu, kemudian prosesnya, sampai ke hilir. Jadi bukan hanya soal memberikan kredit, tetapi bagaimana pembiayaan itu bisa membuat ekosistem usahanya tumbuh," ujar Akhmad.

Melalui pendekatan tersebut, BRI terus memperkuat peran intermediasi perbankan sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional. Pembiayaan diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat konektivitas antarpelaku dalam rantai pasok sehingga menciptakan ekosistem pangan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. RHT

PT POSO ENERGY

Tebar 1.000 Benih Sidat di Danau Poso

SULTENG RAYA - PT Poso Energy melakukan penebaran kembali (restocking) sebanyak 1.000 benih ikan sidat di kawasan Batu Apung atau Watuyano, Desa Dulumai, Kabupaten Poso.

Aksi ini sebagai upaya mendukung pemulihan populasi ikan endemik sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem perairan Danau Poso.

"Kegiatan restocking periode kedua 2026 ini merupakan komitmen PT Poso Energy terhadap pelestarian lingkungan dan habitat ekosistem sidat. Kali ini kami melepas sekitar 1.000 ekor sidat jenis Anguilla marmorata di lokasi Batu Apung atau Watuyano, Desa Dulumai, Danau Poso," kata Manager Representatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT Poso Energy Agus Syamsi di Poso, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan danau yang menjadi habitat alami ikan sidat.

Ia mengatakan kegiatan penebaran benih sidat tersebut merupakan pelaksanaan periode kedua sepanjang 2026 yang dilakukan secara berkala dan terukur.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung pelestarian spesies ikan asli Danau Poso, sekaligus menjaga keberlangsungan habitat perairan agar tetap mampu menopang kehidupan berbagai jenis biota.

Upaya menjaga populasi sidat di Danau Poso tidak hanya dilakukan melalui penebaran kembali benih, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kalangan akademisi, pelaku usaha hingga masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan danau.

Lebih lanjut, ia mengatakan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar upaya konservasi dapat berjalan berkelanjutan, terutama dalam menjaga kualitas habitat, mengendalikan aktivitas yang berpotensi mengganggu ekosistem, serta mempertahankan siklus hidup ikan sidat.

PT POSO Energy restocking sebanyak 1.000 benih ikan sidat di kawasan Batu Apung atau Watuyano, Desa Dulumai, Kabupaten Poso. **FOTO: ANTARA**

Selain program restocking, PT Poso Energy juga mengembangkan fasilitas jalur khusus ikan atau fishway pada bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dikelola perusahaan.

Fasilitas tersebut dirancang untuk membantu pergerakan ikan melewati bangunan bendungan sehingga tetap memiliki akses migrasi dari dan menuju kawasan danau.

Keberadaan fishway diharapkan dapat mendukung keberlangsungan siklus hidup ikan sidat yang secara alami membutuhkan jalur migrasi untuk menjalankan proses pertumbuhan dan reproduksi.

Sehingga upaya pelestarian tidak hanya berorientasi pada penambahan populasi ikan melalui penebaran benih, tetapi juga memastikan tersedianya jalur pergerakan yang memungkinkan ikan mempertahankan siklus hidupnya di habitat alami.

Ia mengatakan Danau Poso merupakan salah satu ekosistem perairan penting di Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi danau.

Ia mengharapkan berbagai upaya pelestarian tersebut dapat memperkuat perlindungan ekosistem Danau Poso sehingga kekayaan hayati, termasuk ikan sidat, tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. ANT

UNGKAP dari halaman 1

serta satu unit mesin pompa hisap elektrik beserta selang.

Total BBM yang berhasil disita mencapai 1.820 liter.

Kapolres mengatakan solar subsidi tersebut rencananya akan dijual kembali di Kabupaten Morowali dengan harga Rp550.000 per jerigen.

Praktik ini tentu merugikan masyarakat dan negara karena menyelewengkan BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan publik.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menyalahgunakan BBM bersubsidi.

"Mari kita bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Percayakan penanganan kasus ini kepada kami. Insya Allah, proses penyelidikan dan penyidikan akan kami lakukan secara profesional dan transparan," pungkasnya. VAN

TERBAKAR dari halaman 1

Menindaklanjuti laporan tersebut, kepala desa memerintahkan Kepala Dusun I bersama masyarakat untuk memeriksa lokasi.

Sekitar pukul 22.00 Wita, masyarakat melaporkan bahwa api telah berhasil dipadamkan.

Namun, pada Jumat sekitar pukul 05.00 Wita, pemilik lahan kembali melaporkan kobaran api yang semakin meluas.

Kepala desa kemudian turun langsung ke lokasi dan melaporkan kejadian tersebut melalui grup komunikasi penanganan kebakaran BPBD untuk mengoordinasikan bantuan lintas instansi.

Upaya pemadaman dimulai pukul 09.00 Wita dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kecamatan Moutong.

Sekitar pukul 13.00 Wita, dua unit truk pemadam kebakaran dari Yon TP 918/MM bersama 20 personel tiba di lokasi untuk membantu penanganan.

BPBD juga mengerahkan dua unit mobil tangki air dan tujuh personel guna memperkuat upaya pemadaman.

Penanganan kebakaran melibatkan sekitar 80 warga, empat personel Polri, 20 personel Yon TP 918/MM, tiga personel Damkar Kecamatan Moutong, serta tujuh personel BPBD.

Seluruh unsur bekerja sama memadamkan api dan mencegah penyebarannya ke wilayah lain.

Berdasarkan pendataan sementara, tujuh warga yang lahannya terdampak masing-masing Idlin seluas satu hektare, Burhanudin lima hektare, Aguslin dua hektare, H. Aco satu hektare, Mustam dua hektare, Ramadan satu hektare, dan Dahwa dua hektare.

Hasil analisis awal menunjukkan kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran rumput di salah satu lahan warga pada Kamis sekitar pukul 17.00 Wita.

Api kemudian merambat ke perkebunan di sekitarnya.

Kondisi vegetasi berupa daun kelapa kering, rumput, dan semak belukar diduga mempercepat penyebaran api.

Lokasi kebakaran berjarak sekitar 150 meter dari permukiman warga sehingga penanganan dilakukan untuk mencegah api menjalar ke rumah penduduk.

Hingga Jumat pukul 17.10 Wita, petugas gabungan bersama masyarakat masih melakukan pemadaman di sejumlah titik kebakaran.

Kapolsek Moutong, AKP Felix Alfons Saudale, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat kondisi cuaca kering.

Ia meminta masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran.

Polsek Moutong juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan sosialisasi serta langkah pencegahan karhutla. AJI

KAPAL dari halaman 1

Menurut dia, keberadaan kapal penumpang di Pelabuhan Donggala tidak hanya memberikan kemudahan akses transportasi laut, tetapi juga menjadi peluang bagi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan pelabuhan.

"Pada intinya pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap hal itu melalui penataan kawasan pelabuhan, termasuk penyediaan tempat usaha dan fasilitas pendukung bagi para pelaku UMKM," sebutnya.

Ia menuturkan masyarakat Donggala bisa memanfaatkan peluang dari aktivitas kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang di Pelabuhan Donggala dengan menyediakan berbagai kebutuhan penumpang.

"Kehadiran kapal-kapal itu dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat," kata dia.

Saat ini terdapat dua kapal penumpang beroperasi di Pelabuhan Donggala yakni KM Dharma Kencana V milik PT Dharma Lautan Utama dan KM Dorolonda milik PT Pelni.

Sementara, KM Lambelu masih beroperasi melalui Pelabuhan Pantoloan Palu. ANT

PEMPROV dari halaman 1

ditelaah lebih lanjut oleh panitia.

Pengalaman pengajuan sebelumnya yang masih memerlukan perbaikan di tingkat kementerian harus menjadi bahan evaluasi agar kekurangan serupa tidak kembali terjadi.

"Dari dokumen yang sebelumnya dikembalikan, kita harus belajar apa saja kekurangannya. Hal tersebut menjadi bahan pembelajaran dalam proses verifikasi kali ini, sehingga pengajuan berikutnya bisa lebih lengkap dan sesuai dengan persyaratan," tegasnya.

Rapat tersebut membahas tahapan teknis verifikasi dokumen, mulai dari pemeriksaan kelengkapan administrasi, penelaahan asal-usul masyarakat hukum adat, keberadaan kelembagaan adat, hingga identifikasi dan pemetaan wilayah adat.

Selain itu, identifikasi wilayah adat dinilai penting untuk mengetahui potensi persoalan di lapangan, terutama wilayah yang bersinggungan dengan aktivitas pertambangan, pemanfaatan kawasan hutan, kegiatan usaha, maupun konflik agraria.

Dengan demikian, proses pengakuan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat dan wilayah adat.

Sekdaprov juga menekankan pentingnya kesinambungan personel yang terlibat dalam tim teknis agar proses verifikasi berjalan efektif dan tidak terhambat akibat pergantian perwakilan dari masing-masing perangkat daerah.

"Yang terpenting, tim yang bekerja harus tetap konsisten agar pemahaman terhadap proses dan dokumen yang diverifikasi tidak terputus. Kita ingin pekerjaan ini berjalan berkesinambungan dan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia juga meminta agar setiap kendala yang ditemukan dalam proses verifikasi segera dikoordinasikan dan dilaporkan, sehingga dapat dicarikan solusi bersama.

Keterbatasan dukungan anggaran untuk pelaksanaan verifikasi lapangan juga menjadi perhatian, sehingga diperlukan strategi dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil serta pihak terkait lainnya.

Melalui rapat koordinasi teknis ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap proses pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberadaan masyarakat adat, melestarikan nilai-nilai budaya, serta memberikan kepastian hukum terhadap kelembagaan dan wilayah adat di Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah H.Hidayat Pakamundi, S.E serta unsur terkait. WAN

PEMKAB dari halaman 1

Sambutan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Krisdaryadi Ponco Nugroho, menyebutkan bahwa penurunan angka kematian ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Bupati mengungkapkan, angka kematian ibu di Kabupaten Parigi Moutong meningkat dari sembilan kasus pada 2024 menjadi 10 kasus pada 2025.

Sementara itu, kematian bayi baru lahir meningkat dari 54 kasus menjadi 70 kasus pada periode yang sama.

Selain itu, sepanjang 2024 hingga Agustus 2026 tercatat 25 kasus kematian ibu dan 190 kasus kematian anak di bawah lima tahun.

Sekitar 86 persen kematian anak tersebut terjadi pada masa neonatal atau 28 hari pertama kehidupan.

Menurutnya, sebagian besar kasus kematian ibu dan anak dapat dicegah melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sistem rujukan yang cepat, serta dukungan keluarga yang siaga.

Karena itu, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga masyarakat.

Upaya tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong 2025–2029, yakni Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa, khususnya misi ketiga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, mengatakan dokumen percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, serta melaksanakan program secara terukur dan berbasis data.

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen tersebut mencakup pemetaan situasi dan penyebab kematian ibu dan anak, penetapan sasaran, arah kebijakan dan strategi daerah, serta penyusunan intervensi berdasarkan siklus kehidupan.

Selain itu, dokumen tersebut akan memperjelas pembagian peran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah desa dan mitra nonpemerintah dalam mendukung pelaksanaan program.

Irdan menambahkan, seluruh intervensi prioritas diharapkan dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA hingga DPA. Penguatan kualitas data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang juga menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen tersebut.

Lokakarya tersebut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, pimpinan OPD lingkup Pemkab Parigi Moutong, tenaga ahli penyusun Rencana Aksi Daerah Kesehatan Ibu dan Anak, para camat, kepala puskesmas, bidan, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Melalui penyusunan dokumen tersebut, Pemkab Parigi Moutong menargetkan terbangunnya komitmen bersama lintas sektor untuk memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama di wilayah sulit akses dan kelompok rentan, sehingga angka kematian ibu dan anak dapat ditekan secara berkelanjutan. AJI

PLN dari halaman 1

Listrik memegang peranan vital dalam menunjang seluruh rangkaian acara, mulai dari sistem penerangan utama, perangkat pendukung acara indoor maupun outdoor, hingga fasilitas penunjang operasional pendidikan di masa depan.

Sebagai langkah preventif, jajaran manajemen PLN turun langsung untuk mengidentifikasi potensi kendala sedini mungkin serta memastikan aspek teknis memenuhi standar keselamatan operasional.

General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Wahyu Prasetyo, menegaskan bahwa PLN berkomitmen penuh untuk menghadirkan kualitas pelayanan terbaik pada setiap agenda penting dan strategis di Sulawesi Utara, termasuk peresmian fasilitas pendidikan bertaraf nasional seperti SMA Taruna Nusantara.

"Kehadiran institusi pendidikan unggulan seperti SMA Taruna Nusantara di Langowan merupakan kebanggaan sekaligus dorongan besar bagi kemajuan kualitas sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, PLN hadir memastikan bahwa seluruh infrastruktur kelistrikan pendukung berada dalam kondisi yang sangat prima, andal, dan siap mengalirkan energi tanpa hambatan. Kami mengawal kesiapan ini secara berlapis dari hulu hingga hilir demi kelancaran dan kesuksesan agenda peresmian tersebut," ungkap Wahyu.

Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Manager PLN UP3 Manado, Reki Wowiling, didampingi oleh Manager PLN ULP Kawangkoan, Philipus Sampeliling.

Keduanya mengecek langsung kondisi jaringan tegangan menengah, gardu, serta jalur pasokan listrik yang melintasi kawasan sekolah.

Manager PLN UP3 Manado, Reki Wowiling, menyampaikan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan bersama tim teknik di lapangan guna memastikan seluruh skema kelistrikan berjalan sesuai rencana.

"Kami ingin memastikan kesiapan kelistrikan dilakukan secara cermat dan terukur. Mulai dari pengecekan fisik jaringan hingga pemetaan langkah antisipatif, semuanya dikoordinasikan secara matang bersama tim agar seluruh kebutuhan daya pada hari peresmian dapat disokong secara optimal," ungkap Reki.

Senada dengan hal tersebut, Manager PLN ULP Kawangkoan, Philipus Sampeliling, menambahkan bahwa pemeriksaan langsung ini menjadi bagian dari prosedur operasional untuk memastikan keandalan di wilayah kerja setingkat Unit Layanan Pelanggan tetap terjaga secara konsisten.

"Pengecekan langsung ini membantu kami memetakan kondisi aktual jaringan secara akurat. Dengan koordinasi yang erat dan kepatuhan ketat terhadap standar keselamatan kerja, kami optimis pasokan listrik di kawasan SMA Taruna Nusantara dapat mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dengan aman dan lancar," tambah Philipus.

Seluruh rangkaian pemeriksaan dan penyiapan infrastruktur ini tetap memegang teguh prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Setiap personel di lapangan diwajibkan mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) demi melindungi keselamatan kerja, menjaga keamanan lingkungan, serta memastikan keandalan sistem tetap terjaga secara berkelanjutan.

Melalui langkah proaktif ini, PLN UID Suluttenggo membuktikan komitmen nyatanya dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, sekaligus mengambil peran strategis dalam memajukan infrastruktur pendidikan di bumi Sulawesi Utara.*HIJ

PT. BFI FINANCE
(0451-422678)
Penawaran Atas Unit

DAIHATSU-ALL NEW TERIOS-X 1.5 MT DF 2021 DC1396AB. TOYOTA-GRAND NEW AVANZA-FACELIFTG-13MT DF 2020 DN1759IH. HONDA-BEAT-SPORTY CBS ISS 2021 DN5497JH. HONDA-GENIO-CBSISS 2020 DN2872IS. HONDA-BEAT-FI CW 2015 DN2770IA. YAMAHA-NMAX-155 2021 DC3870XR. YAMAHA-AEROX-125LC 2016 DN3057PJ. YAMAHA-NEWVIXION-R 2025 DN5270PW. FORD-ECOSPORT-TITANIUM 1.5 AT 2014 DN1683VY. TOYOTA-CALYA-G 1.2 AT 2017 DN1785CF. HONDA-BRIO-SATYA S 1.2 MT 2014 DN1334CK. YAMAHA-NEWVIXION-SE 2016 DN5981CS. DAIHATSU-ALL NEW XENIA-R SPORTY VVTI 1.3 MT 2012 DN1271UY . HONDA-ALL NEW SCOOPY-STYLISH 2019DM2025EV. TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT 2012 DN1530EG. TOYOTA-CALYA-G 1.2 MT 2018 DN1096KG. HONDA-BEAT-DELUXE CBS ISS 2022 DN6414PQ. TOYOTA NEW AVANZA VVTI S 1.5 MT 2010 DN1335DA. DATSUN-GOPLUS-T 1.2 MT 2015 DN1448DC. YAMAHA-XRIDE-ADVENTURE 2016 DN3031DS. DAIHATSU-GRAND NEW XENIA-R1.3MT 2020 DN1904ND. TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT 2009 DT1516AF. KIA-ALL NEW PICANTO-SE 1.2 MT 2011 2016 DN1114DG. TOYOTA-GRAND NEW AVANZA-G 1.3 MT DN1937DG.

SULTENG RAYA
PALU NHGHYA

ASN di Palu Dilatih Penguatan Integritas Antikorupsi

PEMBUKAAN Pelatihan Penguatan Integritas dan Pendidikan Antikorupsi bagi PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Palu, Senin (2/11/2026). **FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU**

SULTENG RAYA- Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN).

Menurut wakil wali kota, integritas tidak cukup hanya dipahami melalui teori, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku dan tindakan nyata di lingkungan kerja maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Imelda saat menghadiri sekaligus membuka Pelatihan Penguatan Integritas dan Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Palu, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Wali Kota Palu itu diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Palu dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 2 hingga 4 November 2026, dengan melibatkan ASN dari berbagai perangkat daerah.

Dalam sambutannya, wakil wali kota menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan salah satu langkah Pemerintah Kota Palu dalam menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 melalui rencana aksi yang telah disusun.

Wakil wali kota menjelaskan, penguatan integritas menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Karena itu, setiap ASN diharapkan tidak hanya memahami prinsip-prinsip antikorupsi, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menerapkannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"Setiap kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa setiap kegiatan, setiap program jangan hanya dijadikan sebuah formalitas untuk menyelesaikan program," tegas wakil wali kota.

Wakil wali kota mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak semata-mata diukur dari terlaksananya kegiatan, melainkan dari perubahan dan manfaat yang dihasilkan, terutama dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur serta pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, wakil wali kota meminta seluruh peserta agar menjadikan pelatihan tersebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki pola pikir, sikap, dan budaya kerja, sehingga nilai-nilai integritas benar-benar melekat dalam kehidupan sehari-hari.

"Selesai pelatihan betul-betul diterapkan dalam tindakan integritas, dalam implementasi di lapangan, di ruang kerja, karena berbicara integritas bukan hanya berbicara terkait global, tetapi bagaimana itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari," ujar wakil wali kota.

Menurut wakil wali kota, pemerintahan yang baik tidak hanya dibangun melalui aturan dan sistem yang memadai, tetapi juga membutuhkan aparatur yang jujur, disiplin, profesional, serta memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari KPK RI, yakni Widyaiswara KPK Manoto Togatorop dan Galih Pramana Natanegara.

Materi yang diberikan mencakup penguatan budaya integritas, strategi pencegahan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Palu mendorong seluruh ASN untuk menjadikan integritas dan nilai-nilai antikorupsi sebagai landasan dalam bekerja, mengambil keputusan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya ini diharapkan mampu memperkuat budaya birokrasi yang bersih dan profesional, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. ABS

Polisi Intensifkan Razia dan Penyekatan Pascabentrok Warga di Palu

JAJARAN kepolisian meningkatkan kegiatan pengamanan melalui razia rutin di kawasan Jembatan Lalove, Kelurahan Nunu, Minggu (1/11/2026). **FOTO: ANT/RIFKI**

SULTENG RAYA- Jajaran kepolisian meningkatkan kegiatan pengamanan melalui razia rutin (sweeping) secara bertahap guna meredam potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pascabentrokan antarwarga di wilayah Nunu dan Tatura Utara (Anoa), Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Bentrokan antarwarga tersebut sebelumnya kembali pecah di kawasan Jembatan Lalove, Kecamatan Tatanga, pada Rabu (28/10) sekitar pukul 17.00 Wita. Akibat aksi saling serang itu, sejumlah warga dilaporkan mengalami luka-luka, dan satu orang warga dari pihak Anoa meninggal dunia akibat insiden tersebut.

"Kita melaksanakan sweeping pada sore hari ini secara bertahap untuk mengamankan daripada situasi kamtibmas di Nunu dan Anoa," ujar Danki II Batalyon A Pelopor, Iptu Taufik Andriono, Minggu (1/11/2026).

Menurut dia, pihaknya bersama jajaran terkait menggelar razia secara bertahap untuk mengamankan situasi Kamtibmas di Nunu dan Anoa.

Taufik menjelaskan razia yang berfokus pada pemeriksaan senjata tajam (sajam) tersebut digelar secara tentatif sebanyak tiga hingga empat kali dalam sehari.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ditemukan adanya kepemilikan sajam yang mencolok dari warga yang melintas di pos penyekatan. "Selama kita lakukan operasi razia ini, belum ada temuan senjata tajam atau kriminal lainnya," terangnya.

Secara umum, kondisi pascabentrokan dilaporkan berangsur aman dan terkendali. Warga diimbau untuk tetap tenang dan kembali beraktivitas ke rumah masing-masing, sementara aparat gabungan terus bersiaga untuk memastikan keamanan bersama. ANT

Pemprov Sulteng Perkuat Promosi untuk Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

FOTO: ILUSTRASI

SULTENG RAYA- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat promosi pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan daerah guna meningkatkan kunjungan wisatawan. "Pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata mendukung pengembangan pariwisata melalui fasilitasi promosi di tingkat nasional maupun internasional," kata Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Sulteng Joyce Sagita Novyanti, Senin (2/11/2026).

Ia mengatakan pengembangan pariwisata juga dilakukan dengan penguatan penyelenggaraan kegiatan di daerah, kerja sama dengan pemerintah pusat dan pelaku industri pariwisata, serta peningkatan kapasitas pelaku pariwisata.

Selain itu, Pemprov Sulteng juga mendorong penguatan branding "Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit" untuk memperkenalkan identitas dan keunikan pariwisata daerah kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Menurut dia, branding tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan beragam potensi wisata Sulawesi Tengah, mulai dari wisata alam, bahari, budaya, hingga warisan megalitikum. Ia juga menuturkan pengembangan pariwisata daerah juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan destinasi, promosi, dan penyelenggaraan acara wisata dapat berjalan lebih terpadu.

"Penguatan promosi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, pengembangan desa wisata, dan penguatan ekonomi kreatif juga terus dilakukan," ujarnya.

Ia menjelaskan pelibatan UMKM, pengelola destinasi, komunitas budaya, serta pelaku industri perjalanan juga penting untuk menciptakan paket wisata yang terintegrasi. Untuk itu, ia mengharapkan melalui berbagai upaya tersebut, wisatawan diharapkan tidak hanya berkunjung, tetapi juga tinggal lebih lama sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Dinas Pariwisata mencatat perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) di Sulawesi Tengah selama Januari-Agustus 2026 mencapai sekitar 7,95 juta perjalanan dengan jumlah perjalanan tertinggi terjadi pada Maret, yakni sekitar 1,16 juta perjalanan. ANT

Dua Kapal PELNI Beroperasi di Pelabuhan Donggala dan Pantoloan Palu

KM Dorolonda milik PT Pelni saat pertama kali sandar di Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah, Sabtu (31/10/2026). **FOTO: ANT/MOH SALAM**

SULTENG RAYA- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Palu memastikan terdapat dua kapal penumpang yang melayani transportasi laut di Sulawesi Tengah (Sulteng), yakni KM Lambelu dan KM Dorolonda untuk memperkuat transportasi laut di daerah tersebut.

Kepala Cabang PT Pelni Palu Christian Moreys Nainggolan, di Donggala, Minggu (1/11/2026), mengatakan kedua kapal itu melayani dua pelabuhan seperti Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Pantoloan Palu.

"Untuk periode 31 Oktober hingga 21 November 2026 ada enam rute masing-masing empat tujuan Pelabuhan Pantoloan dan dua lainnya menuju Pelabuhan Donggala," kata Moreys.

Ia menuturkan layanan di Pelabuhan Pantoloan Palu dilakukan oleh KM Lambelu, sementara untuk Pelabuhan Donggala menggunakan KM Dorolonda.

"Pelayanan di Pelabuhan Donggala sebanyak dua kali, yakni 31 Oktober dan 10 November mendatang, sedangkan KM Lambelu di Pelabuhan Pantoloan terdiri dari tanggal 1, 7, 15 dan 21 November 2026," ujarnya pula.

KM Dorolonda sudah mulai melayani trayek reguler di Pelabuhan Donggala pada 31 November 2026 dengan tujuan Bitung-Ternate-Sorong-Manokwari-Biak-Serui-Jayapura. Sedangkan KM Lambelu melayani di Pelabuhan Pantoloan Palu tanggal 1 November dengan tujuan Balikpapan, Pare-Pare, Makassar, Bau-bau, Maumere dan Larantuka. ANT